



LKIP

**Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi NTT**

2023



🌐 Laman: www.birobarjasntt.net

📍 Jl. Raya El Tari No. 52 Kupang

Pos-el: biropbj@nttprov.go.id



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

Laman : biro-pbj.nttprov.go.id

**LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2023
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTT**

No	Reviewer	Catatan/Koreksi
1.	Kepala Sub Bagian Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	a. Verifikasi data capaian tiap bagian, kendala pencapaian indikator dan PK 2023; b. Perhitungan persentase capaian; c. Edit penulisan, font, kerapian dan konsistensi.
2.	Kepala Bagian Pengelolaan LPSE	
3.	Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi NTT,

Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS.Sp
Pembina Tk. I

NIP 19750308 199903 1 004

PARAF HIERARKI	
Kabag Pengelolaan LPSE	
Kasubag Pembinaan SDM PBJ	
Perancang Kebijakan PBJ	

KATA PENGANTAR

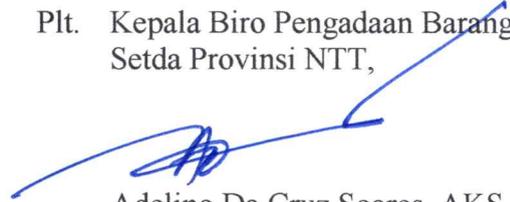
Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT adalah laporan tentang pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/ lembaga Negara yang dibaiayai dari Anggaran Negara agar menyampaikan laporan, sekaligus merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban oleh sebuah organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dan Target Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dan realisasinya. Secara umum, selama Tahun 2023 sebagian besar sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggung jawaban kepada *stakeholders* serta sebagai data dan informasi bagi peningkatan kinerja organisasi di tahun yang akan datang.

Kupang, Januari 2024

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi NTT,



Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS.Sp
Pembina Tk. I
NIP 19750308 199903 1 004

PARAF HIERARKI	
Kabag Pengelolaan LPSE	
Kasubag Pembinaan SDM PBJ	
Perancang Kebijakan PBJ	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media informasi yang wajib dibuat oleh setiap Perangkat Daerah untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan capaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Berkenaan dengan itu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai salah satu Satuan Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2023.

Dalam LKIP Tahun 2023 ini, dipaparkan secara runtut dan detail kinerja yang dicapai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT yang diawali dari uraian substantif dokumen perencanaan (RENSTRA, RKT dan Penetapan Kinerja) hingga deskripsi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dicapai, baik dalam hal capaian kinerja *output*, capaian kinerja *outcomes* maupun akuntabilitas keuangan.

Visi dan Misi Kepala Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT adalah misi ke-5 (lima) yaitu: “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Sedangkan rumusan tujuan Renstra Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah: **“Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Meningkatkan Tertib Administrasi Pembangunan serta Kepercayaan Publik dalam pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa”**.

Secara umu, kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut: (1) Terlaksananya proses tender paket PBJ mencapai 100%, (2) Belum tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM pengelola PBJ (Jumlah JF PPBJ) dan (3) Terlaksananya jumlah proses paket PBJ menggunakan SPSE mencapai 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Dasar Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Aspek Strategi Organisasi	3
I.5 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
I.6 Sumber Daya Aparatur.....	10
I.7 Isu Strategis.....	11
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
II.1 Perencanaan	13
1. Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi	13
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
III.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	19
III.2 Akuntabilitas Kinerja	22
III.3 Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV. PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN	10
Tabel 1.2	Klasifikasi PNS	10
Tabel 1.3	Jumlah Pejabat Struktural/Fungsional.....	10
Tabel 1.4	Jumlah PNS/CPNS menurut Tingkat Pendidikan	11
Tabel 1.5	Jumlah Tenaga Kontrak menurut Fungsi dan Tugas.....	11
Tabel 2.1	Sasaran dan Indikator Kinerja	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	17
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	18
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal.....	21
Tabel 3.2	Paket Tahun 2021	22
Tabel 3.3	Paket Tahun 2022.....	22
Tabel 3.4	Paket Tahun 2023.....	23
Tabel 3.5	APBN Tahun 2021	23
Tabel 3.6	APBN Tahun 2022	24
Tabel 3.7	APBN Tahun 2023	24
Tabel 3.8	APBD Tahun 2021	25
Tabel 3.9	APBD (DAK/DAU) Tahun 2022	26
Tabel 3.10	DAU Tahun 2021	26
Tabel 3.11	DAU Tahun 2022	27
Tabel 3.12	DAU Tahun 2022	27
Tabel 3.13	DAU Tahun 2023	28
Tabel 3.14	DAK Tahun 2021	28
Tabel 3.15	DAK Tahun 2022	29
Tabel 3.16	DAK Tahun 2023	29
Tabel 3.17	Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	30
Tabel 3.18	Realisasi Penyerapan Anggaran TA.2021	33
Tabel 3.19	Realisasi Penyerapan Anggaran TA.2022	33
Tabel 3.20	Realisasi Penyerapan Anggaran TA.2023	34

Tabel 3.21	Realisasi Penyerapan Anggaran pada 9 Kegiatan dan 23 Sub-Kegiatan	35
------------	---	----

DAFTAR BAGAN

Bagan I. Struktur Organisasi Biro PBJ Setda Provinsi NTT	9
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Pengadaan barang dan jasa (selanjutnya disingkat PBJ) mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. PBJ merupakan proses penyediaan barang dan jasa untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. PBJ lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan prinsip efisien, efektif, bersaing, terbuka, transparan, akuntabel dan perlakuan yang adil bagi semua pihak serta memberikan manfaat bagi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (*value for money*).

Sejalan dengan semangat itu, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dengan tujuan untuk menjadi unit organisasi mandiri dan profesional dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Harapan menjadi unit organisasi yang mandiri dan profesional telah menyemangati Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ) Setda Provinsi NTT untuk bekerja dan mendapatkan sertifikat nasional dari LKPP RI sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pusat Keunggulan (*Centre of Excellent*) pada 30 Oktober 2018.

Sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa (*Center of Excellent*), Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas : membantu Asisten Perekonomian dan

Pembangunan dalam penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa (Pasal 14 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur).

Sebagai unit kerja yang melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, dituntut ntuk berkerja profesional, transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas adalah pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan secara transparan dan periodik kepada Pimpinan.

Pelaporan disampaikan agar Gubernur Nusa Tenggara Timur mengetahui perkembangan atau progres pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara periodik, hambatan atau masalah yang dihadapi serta kebijakan yang bisa ditempuh untuk mengatasinya.

1.2.DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro PBJ Setda Provinsi NTT Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;

4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya LKIP Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT tahun 2023 adalah :

1. Maksud

Untuk melaporkan hasil kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dalam Tahun Anggaran 2023, termasuk permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang ditempuh.

2. Tujuan

- a. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dalam Tahun Anggaran 2023.
- b. Menganalisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Tahun 2023 untuk selanjutnya dijadikan sebagai masukan bagi perbaikan kinerja.

1.4. ASPEK STRATEGI ORGANISASI

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unit kerja yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip efisien, efektif, persaingan sehat, terbuka, transparan, akuntabel dan perlakuan yang adil bagi semua pihak serta memberikan manfaat bagi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (*value for money*) yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan perekonomian nasional dan daerah.

1.5. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Memperhatikan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas : *membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah organisasi perangkat daerah dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Uraian tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah merumuskan program kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa meliputi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, terbuka, transparan, dipercaya dan tidak diskriminatif.

Adapun perincian tugas Kepala Biro PBJ Setda Provinsi NTT sebagai, berikut:

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro dan masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan perangkat daerah berbasis kinerja;

4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasinya program kerja;
5. Menyusun kebijakan tentang pola hubungan kerja antar perangkat daerah dan hubungan kerja dengan memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik;
6. Mengoordinasikan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
7. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
8. Mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
9. Mengoordinasikan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

Dalam melaksanakan tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 3 (tiga) Bagian dan 1 (satu) Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rumusan uraian tugas sebagai berikut :

1. Bagian Pengelolaan PBJ.

Tugas Bagian Pengelolaan PBJ adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan

pengadaan barang dan jasa meliputi pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Pengelolaan PBJ dibantu Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Tugas Bagian Pengelolaan LPSE adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan LPSE yang meliputi pengelolaan system pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi serta pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibantu Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;

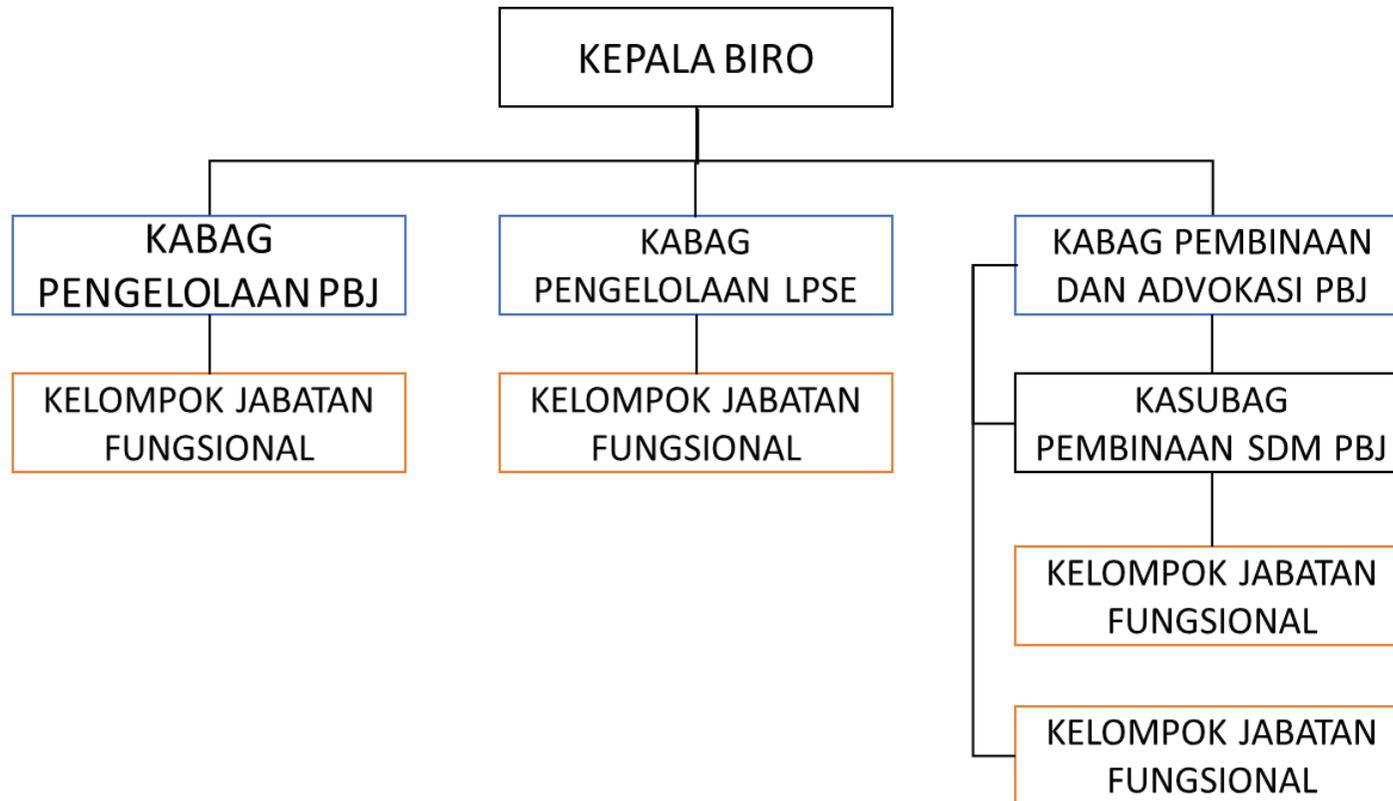
Tugas Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa meliputi Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan ketentuan prosedur yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ dibantu 1 Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dibantu Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan

Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut :

Bagan I.
Struktur Organisasi Biro PBJ Setda Provinsi NTT



Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT

1.6. Sumber Daya Aparatur

Untuk mendukung operasional dalam implementasi tugas dan fungsi Biro PBJ Setda Provinsi NTT, didukung oleh sumber daya aparatur dengan rincian jumlah ASN dan Tenaga Kontrak sebanyak 64 orang, dengan data terpilah sebagai berikut :

a. Jumlah ASN :

Tabel 1.1
Jumlah ASN

No	Klasifikasi ASN	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	PNS	47	38	9
2	CPNS	-	-	-
3	Tenaga Kontrak	17	8	9
Jumlah		64	46	18

Sumber: Data Biro PBJ, Januari 2024

b. Klasifikasi PNS

1. Jumlah PNS Menurut Golongan :

Tabel 1.2
Klasifikasi PNS

No	Golongan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Golongan IV	6	6	-
2	Golongan III	37	29	8
3	Golongan II	4	3	1
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		47	38	9

Sumber: Data Biro PBJ, Januari 2024

2. Jumlah Pejabat Struktural / Fungsional :

Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Struktural/Fungsional

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pejabat Eselon II-B	-	-	-
2	Pejabat Eselon III-A	3	3	-
3	Pejabat Eselon IV-A	1	1	-
4	Pejabat Fungsional	18	10	8
Jumlah		22	14	8

Sumber: Data Biro PBJ, Januari 2024

3. Jumlah PNS/CPNS menurut Tingkat Pendidikan :

Tabel 1.4
Jumlah PNS/CPNS menurut Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Doktor (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	10	9	1
3	Sarjana (S-1)	31	26	5
4	Diploma III (D-III)	1	-	1
5	SLTA/SMK	5	3	2
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
Jumlah		47	38	9

Sumber: Data Biro PBJ, Januari 2024

4. Jumlah Tenaga Kontrak menurut Fungsi dan Tugas:

Tabel 1.5
Jumlah Tenaga Kontrak menurut Fungsi dan Tugas

No	Fungsi	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pengadministrasi umum	11	5	6
2	Tenaga IT	3	2	1
Jumlah		14	7	7

Sumber: Data Biro PBJ, Januari 2024

1.7. ISU STRATEGIS

Setelah memperhatikan dan mempelajari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur maka dirumuskan dan ditetapkan isu-isu strategis bidang pengadaan barang dan jasa, sebagai berikut :

- a. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peran dan tugas yang strategis. Strategis menjalankan fungsi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah;
- b. Sumber daya manusia (SDM) pengelola pengadaan barang/jasa, baik dari sisi kualitas dan kuantitas merupakan faktor penting dalam pencapaian target bidang pengadaan barang/jasa.

- c. Peningkatan manajemen pengadaan barang dan jasa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengadaan barang dan jasa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, berkualitas dan transparan.

Dengan Indikator kinerja yang terukur, baik Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu selanjutnya diimplementasikan melalui pelaksanaan program kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. PERENCANAAN

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi

RENSTRA Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Tahun 2018-2023 memuat beberapa hal substantif sebagai berikut :

a. Visi

Visi Biro Pengadaan barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti/ sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dirumuskan sebagai berikut : **“NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**.

b. Misi

Berangkat dari visi tersebut, dijabarkan dalam Misi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil.
2. Membangun NTT Sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (*Ring of Beauty*).
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas, maka Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Misi ke -5 (lima) yaitu **Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.**

c. Tujuan dan Sasaran

Sedangkan Tujuan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, sesuai Misi ke-5 adalah :

Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan rumusan tujuan sebagaimana tersebut, adapun rumusan tujuan RENSTRA Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

Tujuan RENSTRA Perubahan Biro PBJ Setda Provinsi NTT:

“Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan publik dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa”.

Mempelajari tujuan tersebut diatas, maka secara umum arah tujuan pembangunan bidang pengadaan barang dan jasa oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan birokrasi yang profesional, berintegritas, kinerja tinggi dan berorientasi kepada pelayanan publik;
2. Peningkatan kompetensi dan kapasitas pelaku/pengelola pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang professional, integritas, kinerja tinggi dan bebas KKN;
3. Peningkatan efisiensi, efektifitas, kualitas, transparansi proses pengadaan barang/jasa mulai dari proses perencanaan,

pelaksanaan dan monitoring evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rumusan tujuan sesuai misi ke - 5 (lima) sebagaimana rumusan tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang Ingin dicapai sesuai RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 — 2023, adalah : **“Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif”**.

Berdasarkan rumusan sasaran sebagaimana tersebut, rumusan sasaran RENSTRA Perubahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, maka dirumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Terlaksana keseluruhan jumlah Tender - Non Tender, *e-Purchasing*, Katalog Lokal dan Swakelola paket pengadaan barang dan jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Tercapai kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan/regulasi pengadaan barang dan jasa;
3. Terlaksana pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Rencana Kerja Tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Tahun 2023 dibuat dan disusun dengan mengacu pada sasaran strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2023 dan sebagai bahan

usulan dalam penyusunan rencana fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2023 yang diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan serta Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dibawah ini terdapat 3 sasaran strategis sesuai dokumen Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja serta target yang diharapkan dapat direalisasikan di Tahun 2023.

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya proses tender paket PBJ Provinsi NTT sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase jumlah, jenis, metode paket PBJ sesuai ketentuan regulasi	100%
2.	Tercapai kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Pengelola PBJ sesuai ketentuan dan peraturan PBJ	Jumlah SDM pengadaan telah memenuhi jumlah, jenis dan standar kompetensi jabfung	15 Orang
3.	Terlaksananya PBJ yang terintegrasi, efisien, adil, transparan, bebas dan bersih dari KKN	Jumlah, jenis dan metode paket PBJ menggunakan SPSE	100%

Sumber: RENSTRA-P Biro PBJ Tahun 2018-2023

Sasaran dan indikator kinerja tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan organisasi kepada pejabat setingkat dibawahnya untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Biro PBJ Setda Provinsi NTT disusun dengan memperhatikan Dokumen Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
1.	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Jumlah paket PBJ berdasarkan metode dan jenis PBJ	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
		Persentase pelaksanaan kaji ulang paket PBJ	
		Persentase pelaksanaan proses tender dan non tender PBJ Perangkat Daerah	
Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
1.	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Tersedia dukungan SPSE dalam proses PBJ	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
		Tersedia pengembangan aplikasi sistem informasi PBJ dari versi yang lama ke versi yang terbaru	
		Tersedia pengelolaan informasi PBJ	
Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
1.	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Persentase pelaksanaan ketatalaksanaan umum, keuangan dan kepegawaian	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
		Persentase jumlah pembinaan kelembagaan UKPBJ Provinsi dan Kota/ Kabupaten	
		Persentase pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan bimtek PBJ	

Sumber: Perjanjian Kinerja, 2023

Selanjutnya program dan kegiatan yang dikerjakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, yang diharapkan dapat meningkatkan peforma dan kinerja sesuai dengan tupoksi adalah:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan		DPA		DPPA
1.	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Rp	1.544.586.480	1.855.292.000
	Kegiatan:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	88.293.400	113.373.200
	Kegiatan:	Administrasi Kepegawaian PD	Rp	89.763.600	89.763.600
	Kegiatan:	Administrasi Umum PD	Rp	211.614.500	349.773.020
	Kegiatan:	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Rp	-	-
	Kegiatan:	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemda	Rp	1.078.214.980	1.205.469.980
	Kegiatan:	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Rp	76.700.000	96.912.200
2.	Program: Kebijakan Dan Pelayanan PBJ		Rp	6.376.918.800	6.018.807.500
	Kegiatan:	Pengelola PBJ	Rp	187.294.100	227.169.800
	Kegiatan:	Pengelola LPSE	Rp	248.188.100	304.857.500
	Kegiatan:	Pembinaan dan Advokasi PBJ	Ro	5.941.436.600	5.486.780.200

Sumber: DPPA Biro PBJ, 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan serta visi dan misi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT.

III.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai acuan untuk menilai kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/*Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

No.	Skala Ordinal	Kesimpulan
1.	$X \geq 85\%$	Sangat Berhasil
2.	$70\% \leq X < 85\%$	Berhasil
3.	$55\% < X < 70\%$	Cukup Berhasil
4.	$X \leq 55\%$	Belum Berhasil

Terkait dengan kedudukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT sebagai institusi unsur staf yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan maka Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT telah membawa manfaat bagi Pemerintah maupun *stakeholders* lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT.

Pengukuran kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT Tahun 2023 disusun berdasarkan sasaran pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang terdiri dari beberapa sasaran strategis. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran.

III.2 Akuntabilitas Kinerja

Sasaran kinerja yang ingin dicapai, sebagai berikut:

A. Terlaksananya proses tender paket PBJ Provinsi NTT sesuai ketentuan yang berlaku

1) Proses pemilihan penyedia melalui proses tender APBD

Perkembangan data jumlah jenis paket PBJ Tahun 2023 berdasarkan DPA-DPPA Tahun 2023, sebagai berikut:

(a) Paket PBJ sumber dana APBD (DAK/DAU)

Tabel 3.2
Paket Tahun 2021
APBD (DAK/DAU/SMI)

No	Jenis Paket	Jumlah	Pagu (Rp.)
1.	PBJ (selesai proses/mechanisme tender, e-purchasing dan penunjukan langsung)	411 Paket	1.802.302.606.465
2.	PBJ Gagal Tender	-	-
3.	PBJ belum selesai Proses	5 Paket	75.124.500.000
4.	PBJ terdampak rasionalisasi anggaran	-	-
Total Paket PBJ TA. 2021		411 Paket	1.877.427.106.465

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2021

Pada Tabel 3.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 411 Paket pada tahun 2021, 406 Paket telah selesai dilaksanakan melalui proses tender, *e-Purchasing* dan Penunjukan Langsung. Sedangkan 5 Paket yang bersumber dari pinjaman PT SMI belum selesai proses tender sehingga terbawa ke Tahun 2022.

Tabel 3.3
Paket Tahun 2022
APBD (DAK/DAU/SMI)

No	Jenis Paket	Jumlah	Pagu (Rp.)
1.	PBJ (selesai proses/mechanisme tender, e-purchasing dan penunjukan langsung)	79 Paket	231.438.338.317
2.	PBJ Gagal Tender	1 Paket	270.000.000
3.	PBJ terdampak rasionalisasi anggaran	2 Paket	1.564.693.400
Total Paket PBJ TA. 2022		82 Paket	233.273.031.717

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2022

Pada Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa dari 82 Paket Tahun 2022, terdapat 79 Paket selesai dilaksanakan melalui proses tender, *e-Purchasing* dan Penunjukan Langsung, sedangkan 1 Paket gagal tender dengan alasan karena tidak ada penyedia yang menawar dan Paket tersebut telah dikembalikan ke PPK tetapi belum ada tindak lanjut dan 2 Paket terdampak rasionalisasi anggaran.

Tabel 3.4
Paket Tahun 2023
APBD (DAK/DAU)

No	Jenis Paket	Jumlah	Pagu (Rp.)
1.	PBJ (selesai proses/mechanisme tender, e-purchasing dan penunjukan langsung)	111 Paket	162.329.161.956,00
2.	PBJ Gagal Tender	-	-
3.	PBJ terdampak rasionalisasi anggaran	-	-
Total Paket PBJ TA. 2023		111 Paket	162.329.161.956,00

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2023

Tahun 2023, Biro PBJ menangani 111 Paket dengan rincian, sebanyak 110 Paket melalui mekanisme tender dan 1 Paket melalui penunjukan langsung oleh perangkat daerah/melalui e-katalog.

(b) Proses pemilihan penyedia melalui proses tender APBN

Tabel 3.5
APBN Tahun 2021

No	Jenis Paket	Jumlah	
		Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	4	1.495.681
2.	Barang	20	4.298.750.000
3.	Konsultansi	-	-
4.	Jasa Lain	1	738.500.000
Total Paket		25	15.325.881.000

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2021

Tahun 2021, Biro PBJ menangani 25 Paket dan semuanya telah selesai diproses.

Tabel 3.6
APBN Tahun 2022

No	Jenis Paket	Jumlah	
		Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	1	7.931.000.000
2.	Barang	22	14.602.850.000
3.	Konsultansi	1	270.500.000
4.	Jasa Lain	-	-
Total Paket		24	22.804.350.000

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2022

Pada Tabel 3.6 di atas, dari total 24 paket dana APBN Tahun 2022, 16 paket diproses melalui mekanisme tender dan 8 paket melalui proses penunjukan langsung.

Tabel 3.7
APBN Tahun 2023

No	Jenis Paket	Jumlah		Selesai Proses Tender		Penunjukan langsung/e-Katalog	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	-	-	-	-	-	-
2.	Barang	10	4.298.750.000	6	1.562.500.000	4	2.736.250.000
3.	Konsultansi	-	-	-	-	-	-
4.	Jasa Lain	-	-	-	-	-	-
Total Paket		10	4.298.750.000	6	1.562.500.000	4	2.736.250.000

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2023

Pada Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa dari total 10 Paket PBJ dana APBN TA 2023 hanya terdapat Paket pengadaan Barang yang kemudian 6 Paket diproses melalui mekanisme tender dan 4 Paket melalui penunjukan langsung oleh perangkat daerah/e-Katalog.

Memperhatikan data tersebut, maka capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ dengan sumber pembiayaan dari APBN dari Tahun 2021 s/d Tahun 2023, dapat dilihat dengan perhitungan:

Tahun 2021:

$$\frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$$

Tahun 2022:

$$\frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$$

Tahun 2023:

$$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

2) Realisasi pemilihan penyedia menggunakan metode tender

Pada Tahun 2021, Biro PBJ Setda Provinsi NTT telah menerima **411 Paket Pengadaan yang bersumber dari APBD (DAK/DAU/SMI)** dengan rincian menurut jenis paket dan sumber pembiayaan yang dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
APBD Tahun 2021

No	Jenis Paket	Jumlah	Pagu (Rp.)
1.	PBJ (selesai proses/mechanisme tender, e-purchasing dan penunjukan langsung)	411 Paket	1.802.302.606.465
2.	PBJ Gagal Tender	-	-
3.	PBJ belum selesai Proses	5 Paket	75.124.500.000
4.	PBJ terdampak rasionalisasi anggaran	-	-
Total Paket PBJ TA. 2021		411 Paket	1.877.427.106.465

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2021

Memperhatikan data tersebut, maka capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ mencapai 100%, dengan perhitungan:

$$\frac{406}{411} \times 100\% = 98,78\%$$

Pada Tahun 2022, Biro PBJ Setda Provinsi NTT telah menerima **82 Paket Pengadaan yang bersumber dari APBD (DAK/DAU/SMI) dan 5 Paket yang terbawa dari Tahun 2021**, maka capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ mencapai 100%, dengan perhitungan:

$$\frac{87}{87} \times 100\% = 100\%$$

Pada Tahun 2023, Biro PBJ Setda Provinsi NTT telah menerima **111 Paket Pengadaan yang bersumber dari APBD (DAK/DAU)** dengan rincian menurut jenis paket dan sumber pembiayaan yang dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
APBD (DAK/DAU)

No.	Jenis Paket	Jumlah		Selesai Proses Tender		Penunjukan langsung/e-Katalog	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	73	145.941.316.000	73	145.941.316.000	-	-
2.	Barang	10	6.993.687.256	9	6.616.587.900	1	377.099.356
3.	Konsultansi	28	9.394.158.700	28	9.394.158.700	-	-
4.	Jasa Lain	-	-	-	-	-	-
Total Paket		111	162.329.161.956	110	161.952.062.600	1	377.099.356

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2023

Memperhatikan data tersebut, maka capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ mencapai 100%, dengan perhitungan:

$$\frac{110}{111} \times 100\% = 100\%$$

a. DAU

Pada Tahun 2021, Biro PBJ Setda Provinsi NTT telah menerima **208 Paket PBJ yang bersumber dari DAU** dengan rincian menurut jenis paket dan sumber pembiayaan yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.10
DAU Tahun 2021

No.	Jenis Paket	Jumlah		Selesai Proses Tender	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	48	261.649.228.909	48	261.649.228.909
2.	Barang	31	60.342.675.426	31	60.342.675.426
3.	Konsultansi	113	79.636.872.200	113	79.636.872.200
4.	Jasa Lain	16	16.900.935.120	16	16.900.935.120
Total Paket		208	418.529.711.655	208	418.529.711.655

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2021

Memperhatikan data tersebut, maka capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ mencapai 100%, dengan perhitungan:

$$\frac{208}{208} \times 100\% = 100\%$$

Pada Tahun 2022, Biro PBJ Setda Provinsi NTT telah menerima **57 Paket PBJ yang bersumber dari DAU** dengan rincian menurut jenis paket dan sumber pembiayaan yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.11
DAU Tahun 2022

No.	Jenis Paket	Jumlah		Selesai Proses Tender	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	13	17.395.036.634	13	17.395.036.634
2.	Barang	33	22.849.752.200	33	22.849.752.200
3.	Konsultansi	6	2.025.492.650	6	2.025.492.650
4.	Jasa Lain	5	14.557.401.873	5	14.557.401.873
Total Paket		57	56.847.673.357	57	56.847.673.357

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2022

Tabel 3.12
DAU Tahun 2022

No	Jenis Paket	Jumlah	
		Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	1	1.400.000.000
2.	Barang	2	631.713.700
3.	Konsultansi	1	164.693.400
4.	Jasa Lain	-	-
Total Paket		4	2.663.427.400

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2022

Pada Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari total 57 Paket dana DAU yang diserahkan ke Biro PBJ dan selesai diproses terdiri dari 48 paket tender, 5 paket penunjukan langsung, 2 paket *redesign*, 1 paket e-katalog dan 1 paket gagal tender dikarenakan tidak ada penyedia yang menawarkan dan paket tersebut sudah dikembalikan ke PPK tetapi belum ditindaklanjuti.

Memperhatikan data tersebut, maka capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ mencapai 100%, dengan perhitungan:

$$\frac{57}{57} \times 100\% = 100\%$$

Pada Tahun 2023, Biro PBJ Setda Provinsi NTT telah menerima **87 Paket PBJ yang bersumber dari DAU** dengan rincian menurut jenis paket dan sumber pembiayaan yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.13
DAU Tahun 2023

No.	Jenis Paket	Jumlah		Selesai Proses Tender		Penunjukan langsung/e-Katalog	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	58	107.508.659.150	58	107.508.659.150	-	-
2.	Barang	7	3.800.687.256	6	3.423.587.900	1	377.099.356
3.	Konsultansi	22	8.039.303.700	22	8.039.303.700	-	-
4.	Jasa Lain	-	-	-	-	-	-
Total Paket		87	162.329.161.956	86	118.971.550.750	1	377.099.356

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2023

Pada Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari total 87 Paket yang bersumber dari dana DAU TA. 2023 yang diserahkan ke Biro PBJ, seluruhnya selesai diproses dengan mekanisme tender sedangkan 1 Paket pengadaan barang melalui pengadaan langsung/e-katalog.

Memperhatikan data tersebut, maka capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ mencapai 100%, dengan perhitungan:

$$\frac{86}{87} \times 100\% = 100\%$$

b. DAK

Pada Tahun 2021, Biro PBJ Setda Provinsi NTT telah menerima **94 Paket PBJ yang bersumber dari DAK** yang diserahkan ke Biro PBJ dengan rincian menurut jenis paket dan sumber pembiayaan yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.14
DAK Tahun 2021

No.	Jenis Paket	Jumlah		Selesai Proses Tender	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	57	257.588.629.570	56	256.965.629.570
2.	Barang	22	80.531.170.000	22	80.531.170.000
3.	Konsultansi	13	8.820.295.200	13	8.820.295.200
4.	Jasa Lain	2	1.050.200.0000	2	1.050.200.0000
Total Paket		94	347.990.294.770	93	347.367.294.770

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2021

Memperhatikan data tersebut, maka capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ dengan perhitungan:

$$\frac{93}{94} \times 100\% = 98,9 \%$$

Pada Tahun 2022, Biro PBJ Setda Provinsi NTT telah menerima **25 Paket PBJ yang bersumber dari DAK** dengan rincian menurut jenis paket dan sumber pembiayaan yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.14
DAK Tahun 2022

No.	Jenis Paket	Jumlah		Selesai Proses Tender	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	17	171.289.600.550	17	171.289.600.550
2.	Barang	2	1.956.019.810	2	1.956.019.810
3.	Konsultansi	6	3.179.738.000	6	3.179.738.000
4.	Jasa Lain	-	-	-	-
Total Paket		25	176.425.358.360	25	176.425.358.360

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2022

Memperhatikan data tersebut, maka capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ dengan perhitungan:

$$\frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$$

Pada Tahun 2023, Biro PBJ Setda Provinsi NTT telah menerima **24 Paket PBJ yang bersumber dari DAK** dengan rincian menurut jenis paket dan sumber pembiayaan yang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.15
DAK Tahun 2023

No.	Jenis Paket	Jumlah		Selesai Proses Tender		Penunjukan langsung/e-Katalog	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	15	38.432.656.850	15	38.432.656.850	-	-
2.	Barang	3	3.193.000.000	3	3.193.000.000	-	-
3.	Konsultansi	6	1.354.855.000	6	1.354.855.000	-	-
4.	Jasa Lain	-	-	-	-	-	-
Total Paket		24	42.980.511.850	24	42.980.511.850	-	-

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, Desember 2023

Pada Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari total 87 Paket yang bersumber dari dana DAK TA. 2023 yang diserahkan ke Biro PBJ, seluruhnya selesai diproses dengan mekanisme tender.

Memperhatikan data tersebut, maka capaian kinerja untuk sasaran terlaksananya proses tender paket PBJ mencapai 100%, dengan perhitungan:

$$\frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$$

Secara umum sesuai target RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, indikator terlaksananya proses tender paket PBJ Provinsi NTT sesuai ketentuan yang berlaku sudah mencapai target yaitu 100% atau sudah berhasil. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterlibatan seluruh pihak, baik dari Biro PBJ sendiri maupun perangkat daerah lain sehingga seluruh proses PBJ dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari *leadership* dalam proses PBJ yang mampu mengarahkan proses PBJ tersebut. Selain itu ketersediaan infrastruktur dan fasilitas seperti *hardware/software* dalam proses PBJ.

B. Tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Pengelola PBJ sesuai ketentuan dan Peraturan PBJ

Pada Januari 2023 jumlah POKJA Pemilihan yang menangani proses pengadaan barang/jasa sebanyak 20 (dua puluh) orang dimana semuanya telah memenuhi syarat minimal sebagai anggota POKJA yaitu telah memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Level I/Dasar dan telah melalui proses seleksi menjadi anggota POKJA yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Saat ini jumlah JF PPBJ sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang berkedudukan di UKPBJ sebanyak 11 (sebelas) orang, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berkedudukan di luar UKPBJ.

Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		Capaian Akhir
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Jumlah SDM pengadaan telah memenuhi	Orang	8	4	12	0	15	7	33,3 %

jumlah, jenis dan standar kompetensi jabatan fungsional								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Biro PBJ Setda Prov. NTT, 2023

Dari Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa target pemenuhan JF PPBJ adalah sebanyak 39 orang pada sampai Tahun 2023, namun realisasi hanya sebanyak 13 orang sehingga pencapaian terhadap realisasi adalah 33,3 % dari jumlah rekomendasi LKPP yaitu 39 orang JF PPBJ. Sedangkan sesuai RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, dari target pemenuhan JF PPBJ 60 % juga belum tercapai. Hal ini disebabkan karena untuk mengikuti ujian kompetensi JF PPBJ yang diselenggarakan oleh LKPP RI, kurang peminat dengan alasan tingginya risiko hukum dalam pengadaan barang/jasa.

Dibutuhkan strategi yang akan menjadi solusi dalam mencapai target pemenuhan tersebut, antara lain:

1. Berkoordinasi dengan BPSDM Provinsi NTT untuk selalu melaksanakan ujian sertifikasi PBJ Lv.1 setiap tahun;
2. Mendorong para ASN yang telah memiliki Sertifikat Lv. 1 menjadi Pelaku Pengadaan (PPK, PP dan Pokja Pemilihan);
3. Mendorong PPK, PP maupun Pokja non-JF PPBJ untuk mengumpulkan portofolio sebagai syarat mengikuti ujian kompetensi JF PPBJ;
4. Sosialisasi risiko hukum dalam PBJ.

C. Terlaksanya PBJ yang terintegrasi, efisien, adil, transparan, bebas dan bersih dari KKN

Sejak Tahun 2021 s/d Tahun 2023, proses PBJ mulai dari perencanaan hingga serah terima PBJ sudah memanfaatkan sistem pengadaan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sehingga proses pengadaan barang/jasa yang terintegrasi, efisien, adil, transparan, bebas dan bersih dari KKN. Aplikasi LPSE sebagai berikut:

1. Aplikasi SPSE 4.5;

Layanan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

2. Aplikasi SiRUP;

Media pengumuman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

3. Aplikasi SIKAP;

Layanan Database untuk melacak kinerja penyedia seluruh Indonesia.

4. e-Katalog;

Aplikasi belanja online yang menyediakan aneka produk yang dibutuhkan K/L/PD.

5. Toko Daring;

Aplikasi kerja sama LKPP dengan *e-commerce* untuk pengadaan langsung dengan nilai paling banyak 50 juta rupiah.

III.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT melaksanakan 2 program, 9 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Rata-rata penyerapan anggaran mulai dari Tahun 2021 s/d Tahun 2022 di atas 90%.

Anggaran Perubahan Tahun 2021 yaitu Rp. 8.361.244.494,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 7.998.598.956,- dengan rincian program sebagai berikut:

Tabel 3.18
Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2021

No.	Program	DPPA 2021	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.291.922.250	Rp. 1.247.017.444
2.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 7.069.322.244	Rp. 6.751.581.512
Jumlah		Rp. 8.361.244.494	Rp 7.998.598.956 95,67 %

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2021

Anggaran Perubahan Tahun 2022 yaitu Rp. 8.029.567.101,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 7.867.604.600,- dengan rincian program sebagai berikut:

Tabel 3.19
Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2022

No.	Program	DPPA 2022	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.439.961.720	Rp. 1.424.292.959
2.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 6.589.605.381	Rp. 6.443.311.641
Jumlah		Rp. 8.029.567.101	Rp. 7.867.604.600 97,98 %

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2022

Total anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 7.874.099.500,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Sembilan ribu

Lima Ratus Rupiah) sesuai APBD-P untuk membiayai 2 program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan.

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 7.117.006.038,- (Tujuh Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) atau 90,39 % dengan rincian sebagaimana dalam Tabel berikut:

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

Tabel 3.20
Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2023

No.	Program	DPPA 2023	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.855.292.000	Rp. 1.766.800.014
2.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 6.018.807.500	Rp. 5.350.206.024
Jumlah		Rp. 7.874.099.500	Rp 7.117.006.038
			90,39 %

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2023

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi anggaran hingga 31 Desember 2023 mencapai 90,39 %. Untuk melihat rincian penyerapan anggaran pada 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.21
Realisasi Penyerapan Anggaran pada 9 kegiatan dan 23 sub kegiatan

Prog /Keg	Sub Keg	Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Perubahan (Rp.)	Jumlah realisasi s/d 31 Desember 2023	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.855.292.000	1.766.800.014	95,23
01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.373.200	44.682.200	39,41
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	44.693.200	44.682.200	99,98
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.680.000	68.659.000	99,97
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.763.600	41.328.550	46,04
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	89.763.600	41.328.550	46,04
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	349.773.020	343.635.029	98,25
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.000.000	80,00
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.800.000	1.800.000	100
	07	Penyediaan Bahan/Material	99.984.500	99.969.100	99,98
	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	59.100.000	59.099.300	100

Prog /Keg	Sub Keg	Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Perubahan (Rp.)	Jumlah realisasi s/d 31 Desember 2023	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.888.520	180.266.629	98,03
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.205.469.980	770.642.980	63,93
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.000.000	17.000.000	100
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	645.360.000	615.510.000	95,37
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.389.700	17.502.700	95,18
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	524.720.280	120.630.280	22,99
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.912.200	93.152.255	96,12
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	82.712.200	78.952.255	95,45
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000	-	0
07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.018.807.500	5.350.206.024	88,89
	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	227.169.800	95.174.228	41,90
	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	28.657.300	28.655.830	99,99
	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	117.240.800	32.351.098	27,59
	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan	81.271.700	34.167.300	42,04

Prog /Keg	Sub Keg	Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Perubahan (Rp.)	Jumlah realisasi s/d 31 Desember 2023	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
		Jasa			
02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	304.857.500	112.801.896	37,00
	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	131.825.400	31.542.196	23,93
	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	99.593.400	58.080.400	58,32
	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	73.438.700	23.179.300	31,56
03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.486.780.200	5.142.229.900	93,72
	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	65.842.600	35.055.400	53,24
	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.344.518.300	5.055.904.200	94,60
	03	Pendampingan, Konsultasi dan /atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	76.419.300	51.270.300	67,09

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2023

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT. Media ini juga sangat penting sebagai masukan dan umpan balik dalam pengambilan keputusan selanjutnya bagi pihak-pihak terkait. Kebijakan yang akan diterapkan selanjutnya diharapkan dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga akan tercipta suatu penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT telah berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan melalui Pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan prinsip efisien, efektif, persaingan sehat, terbuka, transparan, akuntabel dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik dan keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Secara umum sesuai target RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, indikator terlaksananya proses tender paket PBJ Provinsi NTT sesuai ketentuan yang berlaku sudah mencapai target yaitu 100% atau sudah berhasil. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterlibatan seluruh pihak, baik dari Biro PBJ sendiri maupun perangkat daerah lain sehingga seluruh proses PBJ dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari leadership dalam proses PBJ yang mampu mengarahkan proses PBJ tersebut. Selain itu ketersediaan infrastruktur dan fasilitas seperti hardware/software dalam proses PBJ.

Target pemenuhan JF PPBJ adalah sebanyak 39 orang pada sampai Tahun 2023, namun realisasi hanya sebanyak 13 orang sehingga pencapaian terhadap realisasi adalah 33,3 % dari jumlah rekomendasi LKPP yaitu 39 orang JF PPBJ. Sedangkan sesuai RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, dari target pemenuhan JF PPBJ 60 % juga belum tercapai. Hal ini disebabkan karena untuk mengikuti ujian kompetensi JF PPBJ yang diselenggarakan oleh LKPP RI, kurang peminat dengan alasan tingginya risiko hukum dalam pengadaan barang/jasa. solusi dalam mencapai target pemenuhan tersebut, antara lain: berkoordinasi dengan BPSDM Provinsi NTT untuk selalu melaksanakan ujian sertifikasi PBJ Lv.1 setiap tahun, mendorong para ASN yang telah memiliki Sertifikat Lv. 1 menjadi Pelaku Pengadaan (PPK, PP dan Pokja Pemilihan), mendorong PPK, PP maupun Pokja non-JF PPBJ untuk mengumpulkan portofolio sebagai syarat mengikuti ujian kompetensi JF PPBJ dan sosialisasi risiko hukum dalam PBJ.

Proses PBJ mulai dari perencanaan hingga serah terima PBJ sudah memanfaatkan sistem pengadaan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sehingga proses pengadaan barang/jasa yang terintegrasi, efisien, adil, transparan, bebas dan bersih dari KKN. Aplikasi LSPE yaitu: SPSE 4.5, SiRUP, SiKAP, e-Katalog dan Toko Daring.

Akhir kata, terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang membantu serta atas kerjasamanya dalam penyelesaian LKIP Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Kupang, Januari 2024

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi NTT,

Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS.Sp
Pembina Tk. I
NIP 19750308 199903 1 004

PARAF HIERARKI	
Kabag Pengelolaan LPSE	
Kasubag Pembinaan SDM PBJ	
Perancang Kebijakan PBJ	



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS.Sp**
Jabatan : **Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Kosmas D. Lana**
Jabatan : **Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 20 Februari 2024

Pihak Kedua,

Kosmas D. Lana

Pihak Pertama,

Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS,Sp

PARAF HIERARKI	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	
Plh. Kabag RB dan Akuntabilitas	

PARAF HIERARKI	
Kabag Pengelolaan LPSE	
Kasubag Pembinaan SDM PBJ	
Perancang Kebijakan PBJ	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL		TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	2024	
1.	2 Terlaksana proses tender paket pengadaan barang/jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan yang berlaku	3 Persentase jumlah paket pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan (Tender-Non Tender, e-Purchasing, e-Katalog)	4 100%	5 100%	6 $\frac{\text{Total Realisasi Paket PBJ}}{\text{Total Paket PBJ}} \times 100\%$	
2.	Tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola Barang dan Jasa sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan/ regulasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa	13 Orang	4 Orang	$\frac{\text{Realisasi Penambahan JF PPBJ}}{\text{Target Penambahan JF PPBJ}} \times 100\%$	

3.	<p>Terlaksana pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi, efisien, efektif, adil, transparan, bebas, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)</p>	<p>Jumlah, jenis, dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompetitif)</p>	100%	100%	$\frac{\text{Total Paket PBJ yg menggunakan SPSE}}{\text{Total Paket PBJ}} \times 100\%$
4.	<p>Terlaksananya pengadaan barang dan jasa menggunakan metode swakelola</p>	<p>Peningkatan fungsi koordinasi, konsultasi dan pengendalian, pengawasan, monitoring-evaluasi (MONEV) pengadaan barang/jasa dengan pihak eksternal terkait lingkup Provinsi NTT</p>	-	39 Laporan	$\frac{\text{Jumlah Laporan Swakelola}}{39} \times 100\%$

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	APBD		
	a) Belanja(Program)	Rp. 8.021.504.540,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 1.737.933.028,-	Realisasi minimal 90%
	2. Program Kebijakan dan Pelayanan PBJ	Rp. 6.283.571.512,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	-	-
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. 8.021.504.540,-	Realisasi minimal 85%
2.	APBN		
	a) Program Dekonsentrasi	Rp. -	-
	1.	Rp. -	-
	b) Program Tugas Pembantuan	Rp. -	-
	1.	Rp. -	-
	Jumlah Dekonsentrasi+Tugas Pembantuan	Rp. -	-

C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;

F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;

G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);

H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;

I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:

- 1. TL rekomendasi Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;**
 - 2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%.**
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;**
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;**
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);**
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);**
- N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.**

Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Kosmas D. Lana

Kupang, 20 Februari 2024

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS.Sp

PARAF HIERARKI	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	
Plh. Kabag RB dan Akuntabilitas	

PARAF HIERARKI	
Kabag Pengelolaan LPSE	
Kasubag Pembinaan SDM PBJ	
Perancang Kebijakan PBJ	

RENCANA KINERJA TAHUN 2024
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	OUTCOME
			2023	2024	
1	Terlaksana proses tender paket pengadaan barang/jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase jumlah paket pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan (Tender-Non Tender, e-Purchasing, e-Katalog)	100%	100%	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan publik dalam pelayanan pengadaan barang/jasa
2	Tercapainya kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola Barang dan Jasa sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan/ regulasi pengadaan barang dan jasa.	Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	13 Orang	4 Orang	
3	Terlaksana pengadaan barang dan jasa yang terintegras, efisien, efektif, adil, transparan, bebas, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)	Jumlah, jenis, dan metode paket pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE (metode tender kompetitif)	100%	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	OUTCOME
			2023	2024	
4	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa menggunakan metode swakelola	Peningkatan fungsi koordinasi, konsultasi dan pengendalian, pengawasan, monitoring-evaluasi (MONEV) pengadaan barang/jasa dengan pihak eksternal terkait lingkup Provinsi NTT	-	39 Laporan	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan tertib administrasi pembangunan serta kepercayaan publik dalam pelayanan pengadaan barang/jasa

Januari 2023

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 Setda Provinsi NTT,



Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS.Sp
 Pembina Tk. I
 NIP 19750308 199903 1 004